

MODEL *COMMUNITY DEVELOPMENT* SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Bambang Suswanto, Waluyo Handoko, dan Ahmad Sabiq

Universitas Jenderal Soedirman

b.suswanto@yahoo.co.id, ndoko_18@yahoo.com, sabiq_abmad@yahoo.com

Abstract

Pasuruhan Village Binangun district of Cilacap as the location of this research was the village that was attented by the public both nationally and internationally after the arrest of suspected terrorists in 2009. This study used a Participatory Rural Appraisal (PRA) through Focus Group Discussion (FGD), interviews, observation and documentttation. The results of study through three business groups (Sharia cooperative of Abdimas Sejahtera, a group of cattle farming and catfish, as well as small business group) resulted a model of community development in the empowerment program which formed by training and mentoring to enhance the resources and managerial capabilities, and training programs for all business groups to become members of the cooperative. This will be strengthen the institutional and cooperative capital

Keywords: Institutionalization, empowerment, mentoring

Abstrak

Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi lokasi penelitian ini, adalah desa yang pernah menjadi perhatian publik baik nasional maupun internasional pasca peristiwa penangkapan yang diduga teroris pada tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari tiga kelompok usaha (koperasi Syariah Abdimas Sejahtera, kelompok usaha tani dan ternak ikan lele, serta kelompok usaha kecil) menghasilkan model *community development*, dalam progam pemberdayaan berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya dan manajerial, dan program penyuluhan bagi semua kelompok usaha untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini akan lebih memperkuat kelembagaan dan permodalan koperasi.

Kata kunci: Pelembagaan, pemberdayaan, pendampingan

Pendahuluan

Era reformasi memiliki idealisme atau semangat yang tinggi untuk menjalankan demokrasi. Salah satunya yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan. Pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik yang didominasi dan ditentukan pemerintah saja (*top down*), sedang masyarakat (*civil society*) hanya dijadikan objek pembangunan. Namun pembangunan yang berdasarkan partisipasi aktif masyarakat (*civil society*) untuk ikut serta (*bottom up*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi pembangunan.

Sehingga pembangunan menjadi milik bersama antara masyarakat (*civil society*) dengan pemerintah. Pemerintah dapat bersinergi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat (*resource based development*) berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) khususnya di desa. Menurut Rangkuti (2011: 33), bahwa paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran di mana pembangunan menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) yang dikenal dengan pembangunan manusia (*people centered development*), pembangunan berbasis sumber daya lokal (*resource based development*) dan pembangunan kelembagaan.

Kemudian peran, fungsi, dan kemanfaatan pembangunan dapat dirasakan atau dialami khususnya bagi masyarakat (*civil society*) secara nyata adalah di tingkat desa sebagai lembaga paling dekat dan melekat dengan masyarakat. Karena desa menurut Pasal 1 (12) Undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan demikian, pembangunan desa menjadi sangat penting, strategis dan menentukan dalam meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata. Hal ini ditegaskan oleh Adi (2003: 292), bahwa pembangunan di Indonesia akan kurang

mempunyai arti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa, karena disadari masih cukup banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal.

Perlu adanya kajian dan riset yang komprehensif untuk memberikan solusi terbaik bagi pembangunan pedesaan dengan konsep yang lebih partisipatif, di mana semua elemen terlibat dan bekerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menentukan atau mencapai harapan serta tujuan bersama. Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, menurut hasil riset Suswanto et al. (2011) membutuhkan pengembangan potensi dan sumberdaya melalui penyuluhan, pelatihan, adopsi inovasi, pendampingan, dan kemitraan, dengan bantuan berbagai pihak baik pemerintah, perguruan tinggi dan pengusaha (investor).

Karena partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan di antara *stakeholders* yang berada dalam masyarakat yaitu kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan mengambil kebijakan dan lembaga-lembaga lain. Dengan begitu pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka (Syahyuti, 2006: 153).

Bentuk yang sesuai dengan pembangunan partisipatif di desa yaitu konsep *community development* atau pengembangan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan konsepsi pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA dalam Suharto, 2005: 38). Kemudian menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan metode partisipatif yang menekankan pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk membuat penilaian, menganalisis, serta merencanakan sendiri apayang mereka butuhkan.

Untuk keperluan di atas, diperlukan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang secara harfiah artinya pengkajian keadaan desa secara partisipatif. Begitupun menurut Syahyuti (2006: 215), riset dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan salah satu contoh riset yang menghargai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberdayaan bagi masyarakat. Menurut Chambers, (Mikkelsen, 2011: 67-68) bahwa *Participatory Rural Appraisal* (PRA) memungkinkan orang-orang desa menganalisis situasi mereka sendiri secara optimal untuk merencanakan dan melaksanakan tekad di desanya sendiri, sehingga PRA adalah penilaian pedesaan yang partisipatoris.

Menggunakan teknik analisis data dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagaimana menurut Syahyuti (2006: 145-150) bahwa dalam validasi data ada triangulasi untuk menganalisis data, yaitu: *pertama*, dilakukan prinsip triangulasi yang digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin; *kedua*, mencari keragaman dan sekaligus perbedaan; investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal.

Lebih lanjut proses analisis data FGD merupakan tahapan reduksi data dan pengumpulan. Seperti menurut Bungin (2008: 131), analisis data *Focus group discussion* (FGD) yaitu: *pertama*, melakukan koding terhadap sikap dan pendapat pertama yang memiliki kesamaan; *kedua*, menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda; *ketiga*, menentukan persamaan istilah yang digunakan termasuk perbedaan pendapat terhadap istilah yang sama; *keempat*, melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta; *kelima*, mencari hubungan diantara masing-masing katagori yang ada untuk membentuk bangunan hasil diskusi; *keenam*, teknik dalam pelaksanaan FGD dilakukan dengan cara berdialog atau wawancara mendalam dengan suasana keterbukaan.

Berdasarkan rangkaian proses penelitian FGD I untuk mengidentifikasi masalah dan potensi, FGD II menganalisis

solusi, dan FGD III merancang pemodelan, yang disertai dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi, maka hasil dan pembahasan penelitiannya sebagai berikut, yaitu:

Potensi Pengembangan Masyarakat

Hasil penelitian berupa identifikasi masalah dan potensi, yang terdapat tiga jenis pengembangan masyarakat di lokasi penelitian seperti uraian berikut.

Pertama, lembaga koperasi yang bernama Koperasi Syariah Abdimas Sejahtera yang memiliki permasalahan tentang manajemen administrasi dan keuangan, manajemen pengurus dan keanggotaan, serta permodalan dan investasi.

Sedangkan potensi yang teridentifikasi yaitu motivasi dan dedikasi yang tinggi dari pengurus koperasi, tersedianya data yang mendukung administrasi khususnya untuk kelengkapan identitas anggota, terdapat fasilitas komputer di koperasi, serta banyak calon anggota dan terdapat lembaga keuangan serta perusahaan yang bisa dijalin akses kerjasama atau kemitraan.

Kedua, kelompok usaha tani dan peternak ikan lele. Pada kelompok usaha tani teridentifikasi permasalahannya, yaitu: 1) berupa luas lahan pertanian tadah hujan yang lebih dominan (60%) daripada lahan irigasi (40%); 2) kendala penanggulangan hama dan penyakit secara teknis, belum ada pertemuan rutin kelompok tani dikarenakan tempat pertemuan tidak di area pertanian; 3) banyaknya petani yang belum menerapkan atau menggunakan peralatan modern dalam pengelolaan tanaman padi; 4) koperasi pertanian belum mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan petani seperti bibit, pupuk dan obat-obatan.

Sedangkan identifikasi potensi dari kelompok usaha tani yaitu adanya skema pendanaan dari pemerintah untuk peningkatan infrastruktur pertanian yaitu: 1) program Jaringan Irigasi Tani Utama (Jitut) dan atau Jaringan Irigasi Pedesaan (Jides); 2) PPL aktif dalam meningkatkan kemampuan petani dan adanya semangat dalam memper-

tahankan kelompok tani serta Gapoktan; 3) tersedianya lahan untuk dibangun tempat pertemuan kelompok tani di area pertanian; 4) adanya lembaga koperasi sebagai sumber pembiayaan baik dari calon anggota maupun dari lembaga keuangan seperti bank dan program CSR dari perusahaan yang bisa dijalin akses kerjasama oleh koperasi.

Kemudian kelompok peternak ikan lele, permasalahannya adalah kurang tersedianya pasokan bibit ikan lele, minat petani masih kurang untuk beternak lele karena ketidakta-huan akan prospek beternak ikan lele, banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan karena kendala minimalnya fasilitas irigasi, dan pakan ikan lele masih tergantung dari pabrik sehingga margin keuntungan kecil.

Sedangkan potensi yang teridentifikasi dari kelompok usaha peternak ikan lele yaitu budidaya bibit ikan lele berpotensi untuk dikembangkan, prospek dan proses beternak lele mudah dilakukan, sehingga bisa disosialisasikan, masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk beternak lele termasuk pangsa pasar sangat terbuka, dan bahan dasar pembuatan pellet tersedia dan memadai.

Ketiga, kelompok usaha kecil yang teridentifikasi ke dalam tiga kelompok usaha yaitu kelompok usaha kurungan ayam dan kelompok usaha sapu lidi serta kelompok usaha kelontongan. Adapun kelompok usaha pengrajin kurungan ayam dapat diidentifikasi masalah berupa nilai jual hasil kerajinan rendah karena pemasaran masih bersifat lokal dan lewat tengkulak, belum ada inovasi model kerajinan, dan belum ada spesialisasi dalam pekerjaan dan masih merupakan usaha sampingan.

Kemudian identifikasi potensinya yaitu pangsa pasar terbuka luas atau peluang dan prospek sangat positif, adanya keinginan untuk memutuskan ketergantungan terhadap tengkulak, bahan baku utama mencukupi, adanya fasilitas dan kemampuan dalam mengembangkan kerajinan.

Kelompok usaha Sapu lidi dengan identifikasi masalah mengenai terbatasnya permodalan, produksi dan pemasaran serta bahan baku mahal. Terdapat juga potensi yang teridentifikasi yaitu pemasaran sangat bagus, karena permintaan tinggi, tenaga kerja borongan memiliki kemampuan karena pernah menjadi juara lomba sapu dengan kualitas produk yang baik.

Kelompok usaha kelontongan dengan identifikasi masalahnya berupa kurang memenuhi kebutuhan pasar pada komoditas pupuk dan gas elpiji, akses untuk mendapatkan dua komoditas pupuk dan gas elpiji harus melalui pemesanan yang banyak, terbatasnya permodalan usaha.

Sedangkan potensi yang teridentifikasi yaitu permintaan tinggi untuk barang-barang bahan kebutuhan masyarakat tersebut terutama elpiji dan pupuk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pasuruan, dan penghasilan atau pendapatan dengan usaha dagang kelontongan ini cukup bagus.

Analisis Solusi Pengembangan Masyarakat

Hasil analisis dan solusi merupakan tindak lanjut dari proses penelitian yang berdasarkan dari hasil dari identifikasi masalah dan potensi. Adapun analisis dan solusinya sebagai berikut.

Pertama, pengembangan masyarakat (*community development*) Koperasi Syariah Abdimas Sejahtera yaitu secepatnya mendaftarkan koperasi supaya memiliki badan hukum, memaksimalkan kegiatan seperti rapat rutin dan rapat anggota untuk melengkapi pendataan anggota sosialisasi program atau promosi dan konsolidasi, bekerjasama dengan pemerintahan desa dalam melengkapi identitas anggota dan promosi keanggotaan koperasi, peningkatan kemampuan manajerial dan keahlian komputer bagi pengurus, dan melakukan penyuluhan dan strategi promosi koperasi serta pembukaan akses ke pihak bank dan perusahaan.

Kedua, Kelompok usaha tani dan peternak ikan lele. Adapun untuk kelompok tani analisis solusinya yaitu mengajukan program pendanaan bagi Jaringan Irigasi Tani Utama (Jitut) atau Jaringan Irigasi Desa (Jides) untuk memperluas lahan yang mendapat aliran irigasi sehingga dapat membantu peningkatan produktifitas, peningkatan kemampuan teknis petani, peningkatan keaktifan dan kekompakan anggota kelompok, pembuatan tempat pertemuan, membudayakan pertemuan rutin dan perlunya pemimpin kelompok, memberikan penyuluhan untuk menanamkan pemahaman kepada petani tentang efisiensi dan peningkatan produktifitas, meningkatkan kesadaran petani untuk menjadi anggota koperasi dalam memperkuat permodalan koperasi sehingga mampu menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh petani, kemudian menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dengan membuka akses pembiayaan untuk pengadaan peralatan mekanis melalui koperasi.

Sedangkan analisis solusi untuk kelompok peternak ikan lele yaitu penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan tentang prospek serta budidaya ikan lele, memanfaatkan lahan kosong untuk menjadi kolam ikan lele, dan peningkatan infrastruktur irigasi.

Ketiga, Kelompok usaha kecil. Adapun untuk kelompok pengrajin kurungan ayam, solusinya yaitu kerjasama antar pengrajin dan menjadi anggota koperasi untuk lebih bisa mempermudah dalam membuka akses pasar ke luar daerah serta tidak menjalin kerjasama dengan tengkulak karena sudah melalui peran lembaga koperasi, mengadakan pelatihan pembuatan kurungan yang lebih kreatif dan kompetitif, pembagian atau spesialisasi produksi antar anggota kelompok pengrajin sehingga dapat melakukan efisiensi dan mengoptimalkan proses produksi.

Kemudian bagi kelompok pengrajin sapu lidi, analisis solusinya yaitu selama ini mereka sudah mencoba mengatasi persoalan naiknya harga bahan baku dengan mengecilkan ukuran produk yakni dengan mengurangi lidinya. Namun harga

jualnya diusahakan tetap sama. Strategi ini bisa menjadi solusi sementara. Namun dalam jangka panjang tentu akan mengecewakan pelanggan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan adanya upaya untuk mencari bahan baku dengan harga miring. Ini bisa dilakukan bila bahan baku lidi bisa didapatkan di desa Pasuruan sendiri. Tidak harus mencari dari luar daerah. Adapun terkait dengan keterbatasan tenaga kerja, diperlukan penambahan tenaga kerja dengan merekrut atau mengkader untuk diberikan pelatihan membuat sapu lidi. Sedang untuk mengatasi permodalan yang terbatas dibutuhkan pendampingan untuk mendapatkan modal melalui pinjaman yang tidak memberatkan pengrajin, yaitu dengan bergabung menjadi anggota koperasi.

Sedangkan untuk kelompok usaha kelontongan, analisis solusinya adalah dengan ikut menjadi anggota dan mendukung koperasi untuk memiliki surat izin usaha resmi sehingga koperasi bisa menjadi distributor pupuk dan gas. Termasuk untuk menjalin akses kerjasama permodalan.

Model Community Development

Pada kelompok Koperasi Syariah Abdimas Sejahtera, berdasarkan identifikasi masalah dan potensi serta analisis solusi, yaitu tentang manajemen administrasi dan kepengurusan koperasi sebagai hasil dan pembahasan pertama dan kedua. Dengan demikian dalam rangka pembuatan model pengembangan masyarakat (*community development*) dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Melakukan program pemberdayaan dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus koperasi mengenai peningkatan kemampuan bidang manajerial administrasi perkoperasian, manajerial keuangan koperasi, strategi penyuluhan pengembangan dan promosi koperasi, serta dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan kemampuan komputerisasi dan pemanfaatan jejaring sosial melalui internet seperti pembuatan dan pengelolaan *website* koperasi sebagai media informasi, sosialisasi dan

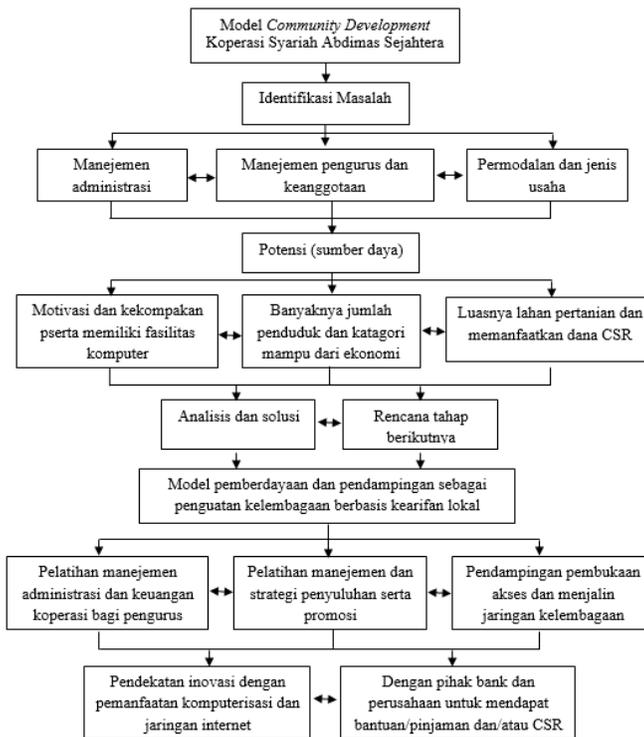
promosi serta memperkuat hubungan jaringan dengan lembaga lain.

- b. Melakukan pemberdayaan dan bantuan pendampingan dalam pelaksanaan penyuluhan serta promosi tentang pentingnya koperasi sebagai usaha bersama yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan kepada anggota koperasi dan umumnya kepada masyarakat sebagai calon anggota koperasi.
- c. Hasil penelitian mengenai permodalan koperasi dan peningkatan usaha, maka hal yang bisa dilakukan adalah sebagaimana yang telah direncanakan pada pengelolaan kepengurusan koperasi dan keanggotaan, yaitu dengan melakukan pemberdayaan dengan kegiatan pendampingan pelaksanaan penyuluhan dan promosi tentang pentingnya koperasi sebagai usaha bersama. Sehingga akan dapat memperkuat keanggotaan dan mengembangkan keanggotaan baru, termasuk permodalan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman serta pengembangan usaha dalam memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat. Selain hal tersebut juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan dalam membuka akses dan pengajuan bantuan permodalan serta penyediaan kebutuhan usaha kepada pihak lembaga seperti bank dan perusahaan yang ada disekitar untuk mendapat bantuan pinjaman atau bantuan hibah dari program CSR.

Dari hasil identifikasi masalah dan potensi, kemudian hasil analisis serta solusi, dapat dibuat model pengembangan masyarakat (*community development*) di Koperasi Abdimas Sejahtera sebagai berikut.

Gambar 1.

Model *Community Development* koperasi



Sumber: diolah penulis

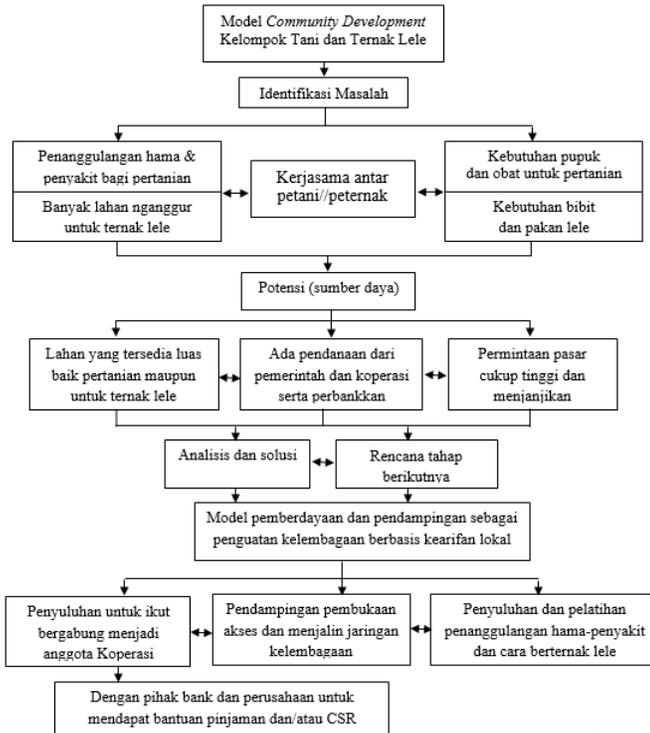
Kedua, bagi kelompok usaha tani adalah pengajuan proposal program Jitut (Jaringan Irigasi Tani Utama) dan Jides (Jaringan Irigasi Pedesaan), perlunya pertemuan rutin antara anggota kelompok tani dan penyuluh, penyuluhan kepada petani tentang manfaat dan arti penting koperasi. Peran gapoktan untuk meningkatkan kesadaran anggota ditingkatkan. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga keuangan dengan pendampingan.

Kemudian kelompok peternak ikan lele, rencana tahap berikutnya yaitu penyediaan bibit baik dari masyarakat sendiri atau mendatangkan dari luar daerah, melakukan kerjasama dengan penyuluh dan petani yang sukses serta mengadakan pelatihan beternak lele yang sukses, pengajuan proposal program Jitut Jides, pelatihan dan bantuan teknis untuk masyarakat dalam pembuatan pellet ikan. Dengan demikian berdasarkan identifikasi masalah dan potensi, kemudian hasil

analisis serta solusi, maka dapat dibuat suatu model *community development* bagi kelompok usaha tani dan peternak ikan lele adalah sebagai berikut.

Gambar 2.

Model *Community Development* Kelompok Tani dan Ternak Lele



Sumber: diolah penulis

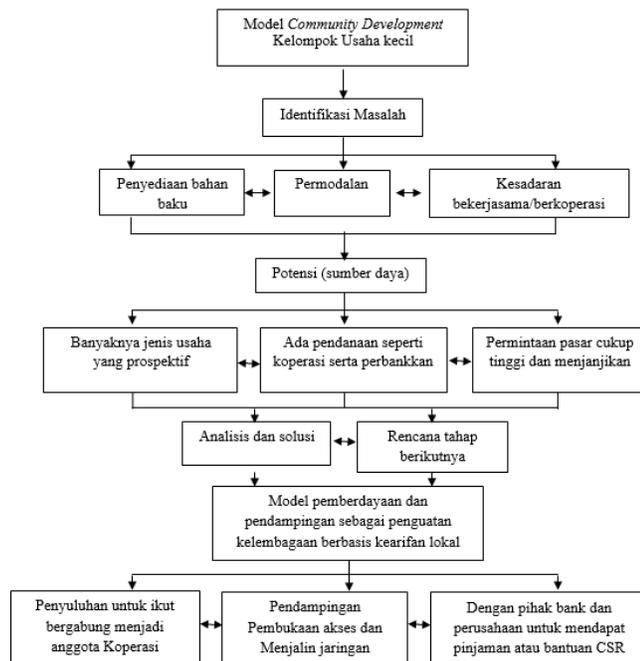
Ketiga, Kelompok usaha kecil, berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi, kemudian analisis serta solusi, maka dapat dirancang suatu model dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Memberdayakan lembaga keuangan rakyat yang telah ada yakni Koperasi Syariah Abdimas Sejahtera sebagai lembaga simpan pinjam untuk membantu permodalan usaha yang tidak memberatkan pelaku ekonomi kecil. Selain itu dalam meningkatkan permodalan koperasi dapat

- membuka akses kerjasama dengan pihak-pihak perbankan dan perusahaan dalam menyalurkan program *corporate sosial responsibility* (CSR) untuk memberikan bantuan modal koperasi.
- b. Meningkatkan pelayanan koperasi agar bisa menjadi penghubung para pengusaha kecil di desa dengan pihak-pihak penyedia bahan kebutuhan masyarakat seperti Pertamina dan PUSRI. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan penyediaan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan gas elpiji dan pupuk bagi pertanian dan peternakan.
 - c. Selanjutnya adalah melaksanakan program penyuluhan dan promosi koperasi kepada para pelaku ekonomi di desa, supaya termotivasi untuk menjadi anggota aktif Koperasi Syariah Abdimas Sejahtera. Karena dapat membantu dalam permodalan dan perluasan pemasaran.

Gambar 3.

Model *Community Development* Kelompok Usaha Kecil



Sumber: diolah penulis

Penutup

Berdasarkan proses hasil penelitian berupa identifikasi permasalahan dan potensi (sumber daya), menganalisis serta mencari solusi, menghasilkan tiga kelompok usaha yaitu Koperasi Syariah Abdimas Sejahtera, kelompok usaha tani dan peternak ikan lele serta kelompok usaha kecil, yang dapat dijadikan model *community development* sebagai strategi pelebagaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang aplikatif berdasarkan metode yang dipergunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Model *community development* tersebut dapat diimplementasikan berupa program pemberdayaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan manajerial bagi koperasi, kelompok tani, peternak ikan serta kelompok usaha kecil.

Kemudian melakukan penyuluhan bagi semua kelompok usaha untuk menjadi anggota koperasi, sehingga akan lebih memperkuat kelembagaan dan permodalan koperasi. Keberadaan dan keberlangsungan lembaga koperasi dapat lebih mudah membuka akses dan jaringan kelembagaan lainnya seperti kepada pihak bank dan perusahaan dalam rangka mendapat pinjaman dan atau bantuan seperti dari *corporate social responsibility* (CSR). Sehingga dari kedua lembaga tersebut dapat membantu dalam permodalan usaha, pengembangan usaha dan dapat saling mendukung.

Dengan demikian, kelompok usaha seperti koperasi, kelompok tani dan peternak lele serta kelompok usaha kecil yang dijadikan model *community development* dapat bersinergi dalam mengembangkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat yang lebih mensejahterakan, dan bisa menjadi model percontohan khususnya bagi pengembangan masyarakat lainnya.

Daftar Rujukan

- Adi, Ispandi, Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunikasi (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, Penerjemah: Matheos Nalle*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rangkuti, Parlaungan, Adil. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Mekanisasi Pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suswanto, Bambang. 2011. "Model Psikologi Humanistik Pasca Penangkapan Teroris di Jawa Tengah". Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2011.
- Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah